

BAB II

GAMBARAN UMUM PASANGAN HARSONO HALIM

A. Profil Pasangan Harsono Halim



Gambar 2.1 Gambar Profil Harsono Halim

Sumber sekretariat DPC GERINDRA Kab. Bantul

B. Visi Misi Pasangan Harsono Halim

Dalam merumuskan visi misinya, Pasangan Harsono Halim melihat bahwasanya tantangan Pemerintah Daerah (pemda) dalam melaksanakan sebuah otonomi Daerah kedepan adalah adanya arus globalisasi dan tuntutan adanya sebuah *Good Governance*. Terkait dengan hal tersebut, Pemda akan dikaitkan dengan berbagai isu yaitu demokratisasi, pariwisata, pembangunan, pemberantasan korupsi, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta mengusung semangat perubahan. Isu-isu tersebut akan bersinggungan dan berinteraksi dalam proses pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan kata lain, Pemda kedepan haruslah bisa mengelola potensi-potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki serta

bisa menggunakan kewenangan-kewenangan yang dijamin dalam Undang-Undang untuk melakukan pengambilan kebijakan, keputusan, serta langkah-langkah cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk bisa mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

Berangkat dari latar belakang tersebut Pasangan Harsono-Halim merumuskan Visi, Misi Serta program dalam Pilkada Bantul tahun 2015.

1. Visi

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera, berdasarkan nilai – nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religious dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sehat, cerdas dan berkepribadian luhur, menyediakan perawatan kesehatan yang memadai untuk seluruh masyarakat dengan pemberian keringanan sampai pembebasan biaya masyarakat pra sejahtera.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan potensi daerah, mendorong pertumbuhan investasi di bidang pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan.
- c. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, memperbaiki pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara terpadu dan berkelanjutan.
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang efisien dan melayani masyarakat tanpa sekat.

- e. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa (KPU Bantul, 2015).

C. Program – Program Pasangan Harsono Halim

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sehat, Cerdas dan Berkepribadian Luhur

- a. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas.
- b. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- c. Penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan daya saing.
- d. Peningkatan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga.

2. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing Berbasis Potensi Daerah

- a. Peningkatan daya saing produk daerah, terutama pertanian dan industry kreatif.
- b. Peningkatan kerjasama investasi dengan lembaga pemerintahan lain dan swasta untuk pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan.
- c. Pengembangan produk pariwisata dengan mengembangkan kawasan dan obyek pariwisata bertaraf internasional, terutama wisata bahari, agro dan budaya.

- d. Peningkatan pemberdayaan UKM dan koperasi melalui pengembangan kapasitas lembaga, modal, produksi dan pemasaran.
- e. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peningkatan dan pengembangan produksi daerah.

3. Meningkatkan kapasitas dan Kualitas Sarana Prasarana Sumber Daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan

- a. Peningkatan kualitas sarana prasarana umum, permukiman, pengairan, perhubungan, energi, dan telekomunikasi.
- b. Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur pedesaan.
- c. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan pelestarian lingkungan hidup secara efisien dan efektif.
- d. Peningkatan kepedulian dan peran masyarakat dalam kelestarian lingkungan hidup.
- e. Perlindungan flora dan fauna sebagai keanekaragaman hayati dan asset bangsa.

4. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Demokratis, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien

- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan public dan pengawasan pelaksanaannya.
- b. Peningkatan system kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efisien, efektif, dan akuntabel.
- c. Peningkatan peran aparatur daerah yang bersih, berwibawa dan professional, yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

- d. Peningkatan pelayanan masyarakat dan system perizinan *one stop service*.
- e. Peningkatan peran desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

5. Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Bantul yang Aman, Progressif dan Harmonis serta Berbudaya Istimewa

- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menciptakan suasana harmonis dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peningkatan koordinasi institusi penegak hukum untuk menjamin terciptanya keamanan, ketertiban, dan stabilitas sosial – politik.
- c. Pengembangan fasilitas lembaga non pemerintah dan kelompok – kelompok masyarakat dalam pembangunan sosial dan kebudayaan daerah.

D. Profil Partai Pendukung

1. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

a. Sejarah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra, adalah sebuah [partai politik](#) di [Indonesia](#) yang didirikan dan diketuai oleh [Letnan Jenderal TNI \(Purn\) H. Prabowo Subianto](#). Partai Gerindra berdiri pada tanggal 6 Februari 2008. Pengurus dan aktivis partai ini dicirikan dengan pakaian safari lengan pendek dan panjang, serta kopiah hitam. Inspirasi nama Gerindra berasal dari nama partai lama, Perindra, yang merupakan pemberian langsung dari Presiden Soekarno.

Pada periode 2009-2014, Partai Gerindra berada di luar kabinet pemerintahan pusat bersama [Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan](#) dan [Partai Hanura](#). Pada [Pemilu 2014](#), partai Gerindra mendapatkan 73 kursi di [Dewan Perwakilan Rakyat](#) Republik Indonesia. Partai Gerindra mengusung [Prabowo Subianto](#) selaku Ketua Dewan Pembina sebagai calon [presiden](#). Pada periode 2014-2019, Partai Gerindra kembali berada di luar kabinet pemerintahan pusat bersama (Wikipedia, 2017).

b. Visi

Visi Partai Gerindra adalah menjadi Partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Misi

Partai GERINDRA memiliki 5 (lima) misi, yaitu :

- 1) Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- 2) Mendorong pembangunan nasional yang menitik beratkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan mengurangi ketergantungan kepada pihak asing;
- 3) Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat;
- 4) Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan praduga tak bersalah dan persamaan hak di depan hukum;
- 5) Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusi melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden untuk menciptakan lapisan Kepemimpinan nasional yang kuat (BPK Gerindra, 2017)

2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

a. Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah satu dari lima partai politik (parpol) yang berbasis massa Islam yang diloloskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bertarung dalam Pemilu 2014. Empat parpol lainnya adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

PKB memiliki ciri khas yang melekat pada dirinya sebagai lembaga politik yang didirikan kaum Nahdliyin, sebutan bagi anggota Nahdatul Ulama (NU), yang jumlahnya puluhan juta di Indonesia. Walau warga NU belum tentu anggota PKB, namun jelas partai itu berbeda dengan, misalnya, PAN yang terkesan lebih dekat dengan warga Muhammadiyah.

Ke-NU-an itu yang sempat membuat PKB pernah berada di posisi ketiga Pemilu 1999. Seperti diakui Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu PKB, Saifullah Mashum, basis kultural NU, beserta kekuatan kharisma para kiai, seperti Gus Dur, adalah bagian tak terlepaskan dari sejarah partai itu.

Bagi PKB sendiri, seperti diakui Saifullah, nilai jual mereka adalah platform dan ideologi PKB yang berusaha menyeimbangkan visi keagamaan dan visi kebangsaan. Dampaknya, PKB menjadi dikenal juga sebagai partai yang inklusif dan terbuka, yang secara

sosiologis kerap dinilai tepat dengan kondisi sosiokultural masyarakat Indonesia.

Hal yang biasa bila PKB selalu bergabung dengan kelompok lainnya menolak kegiatan keagamaan radikal dan destruktif, serta berani melawan kelompok yang biasa membubarkan kegiatan kelompok minoritas secara sewenang-wenang (Berita Satu, 2013).

b. Visi

- 1) Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual;
- 3) Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah

c. Misi

- 1) **Bidang Ekonomi** : menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis;
- 2) **Bidang Hukum** : berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial;
- 3) **Bidang Sosial Budaya** : berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa;

- 4) **Bidang Pendidikan** : berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan;
- 5) **Bidang Pertahanan** : membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabelas masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat (DPP PKB, 2016 diakses di <http://www.dpp.pkb.or.id/visi-dan-misi>).

3. Partai Keadilan Sosial (PKS)

a. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Pada awal berdirinya tanggal 20 Juli 1998 PKS dengan nama Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia. Presiden (ketua) pertama partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.

Nurmahmudi kemudian, ditawarkan jabatan Menteri Kehutanan di Kabinet Persatuan Nasional bentukan presiden Abdurrahman Wahid pada Oktober 1999. Ia menyetujui tawaran tersebut dan menyerahkan jabatan presiden partai kepada Hidayat Nur

Wahid, seorang doktor lulusan Universitas Islam Madinah, sejak 21 Mei 2000.

Karena kegagalan PK memenuhi ambang batas parlemen di pemilihan umum selanjutnya, menurut regulasi pemerintah, mereka harus mengganti nama. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Hukum dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat kabupaten dan kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka Partai Keadilan resmi berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

Dengan bergantinya PK menjadi PKS, partai ini kembali bertanding di pemilihan umum legislatif Indonesia 2004. PKS meraih total 8,325,020 suara, sekitar 7,34% dari total perolehan suara nasional. PKS berhak mendudukkan 45 wakilnya di DPR dan menduduki peringkat keenam partai dengan suara terbanyak, setelah Partai Demokrat. Presiden partai saat itu, Hidayat Nur Wahid, terpilih sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan 326 suara, mengalahkan Sutjipto dari PDIP dengan 324 suara. Hidayat menyerahkan jabatan presiden kepada Tifatul Sembiring, juga seorang mantan aktivis kampus dan pendiri PKS.

Asal-usul PKS dapat ditelusuri dari gerakan dakwah kampus yang menyebar di universitas-universitas Indonesia pada 1980-an. Gerakan ini dapat dikatakan dipelopori oleh Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri Indonesia dari Masyumi (dibubarkan pada 1960) yang mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 1967. Lembaga ini awalnya fokus kepada usaha mencegah kegiatan misionari Kristen di Indonesia. Peran DDII yang paling krusial adalah kelahiran Lembaga Mujahid Dakwah yang berafiliasi dengan DDII, dipimpin Imaduddin Abdulrahim yang aktif melakukan pelatihan keagamaan di Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung.

PKS menggunakan modus operandi Jamaah Tarbiyah untuk memperbesar peluang mendapatkan kader baru. PKS memakai dua strategi dalam merekrut kader. Yang pertama adalah pola rekrutmen individual (*al-da'wah al-fardhiyyah*), atau bentuk pendekatan orang per orang, meliputi komunikasi personal secara langsung. Calon kader yang akan direkrut diajak berpartisipasi dalam forum-forum pembinaan rohani yang diorganisir PKS seperti usrah (keluarga), halaqah (kelompok studi), liqa (pertemuan mingguan), rihlah (rekreasi), mukhayyam (perkemahan), daurah (pelatihan intelektual) dan nadwah (seminar). Sistem yang digunakan PKS ini mirip dengan sistem rekrutmen gerakan Islamis di Mesir. Yang kedua adalah pola rekrutmen institusional (*al-da'wah al'amma*). PKS berafiliasi dengan berbagai organisasi sayap yang berstatus formal atau tidak formal,

sehingga partai dapat memanfaatkan institusi-institusi ini untuk meraup kader potensial.

Kader PKS di seluruh dunia tercatat sebanyak 7,000 orang dan 22 Pusat Informasi dan Pelayanan (PIP) yang tersebar di 22 negara. Jumlah ini merupakan jumlah kader partai politik Indonesia terbesar yang berada di luar negeri. Banyaknya jumlah kader di luar Indonesia ini dimanfaatkan partai untuk menaysar satu kursi DPR.

PKS dikenal sebagai salah satu partai yang paling vokal memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Beberapa aksi PKS untuk kemerdekaan Palestina antara lain dengan menempuh jalur demonstrasi, seperti yang dilakukan pada Maret 2010 di kompleks Monas. Tak jarang pula PKS mengecam negara yang tidak mendukung upaya kemerdekaan Palestina, seperti pada November 2012, saat Amerika Serikat tidak menyetujui masuknya Palestina sebagai negara pemantau di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Demonstrasi PKS dikenal dengan mengorganisir puluhan ribu kader dan tak jarang pula umat non-Muslim ikut di dalamnya, seperti politisi PDI Perjuangan, Sabam Sirait, yang ikut berdemonstrasi bersama massa PKS pada Maret 2010. Selain itu, PKS juga memanfaatkan massa kadernya yang besar untuk menggalang dana dalam jumlah yang besar, dan seringkali sumbangan tersebut disampaikan langsung lewat utusan khusus PKS ke Palestina, seperti saat penggalangan dana serentak seluruh DPW PKS di Indonesia pada

bulan November 2012 (PPI, 2014 diakses di <http://partaislam.blogspot.co.id/2014/03/sejarah-berdirinya-partai-keadilan.html>).

b. Visi

Visi Umum:

“Sebagai partai da’wah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa.”

Visi Khusus:

Partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani.

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai :

- 1) Partai da’wah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 2) Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang.
- 3) Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil ‘alamin.
- 4) Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

c. Misi

- 1) Menyebarkan da’wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir.

- 2) Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi.
- 3) Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat.
- 4) Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.
- 5) Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam.
- 6) Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan islah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi.
- 7) Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas (PPI, 2014).

Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Bantul ikut serta meramaikan Pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Bantul dengan mengusung Suharsono dan Abdul Halim sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan kepala daerah 2015. Dua nama yang diusung sebagai pasangan calon tersebut, yakni Suharsono merupakan tokoh masyarakat yang pernah dinas di institusi kepolisian, sedangkan Abdul Halim merupakan salah satu pengurus inti di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bantul.

Ketiga partai pendukung yaitu PKB, PKS dan Gerindra merupakan partai yang mendukung pasangan Harsono Halim dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bantul. Pada awal pencalonan pasangan tersebut, diketahui secara administrasi hanya diusung PKB dan Gerindra, namun secara dukungan pasangan ini didukung partai lain yang masuk dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Sebelum mencalonkan pasangan tersebut ketiga parpol yakni Gerindra, PKB dan PKS sepakat untuk mengusung pasangan calon tersebut, akan tetapi untuk surat rekomendasi dari DPP PKS saat itu belum turun. Di atas kertas (administrasi) memang hanya dua partai yang mengusung, akan tetapi PKS dalam hal ini posisinya sebagai partai pendukung, bahkan Partai Demokrat bergabung (Republika, 2015 diakses di <https://daerah.sindonews.com/read/1027224/151/pan-merasa-ditelikung-gerindra-pks-1438140971/>).

Kedua partai yaitu PKS dan Gerindra sah mengusung pasangan Harsono Halim karena kursi yang diperoleh di DPRD setempat sudah memenuhi syarat minimal 20% atau 10 kursi. Diketahui bahwa Gerindra enam kursi dan PKB ada empat kursi (Sindonews, 2015 dikases di <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/07/28/ns76dk354-demokrat-akan-maksimal-menangkan-calon-kepala-daerah-yang-diusungnya>).

E. Beberapa Kasus Political Marketing di Indonesia

1. Proses Marketing Politik Calon Anggota Legislatif pada Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus Kusuma Retno Rahayono, S.Sos sebagai Calon Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Daerah Pemilihan Jawa Timur V Malang Raya).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mar'atul Makhmudah, dan Juwita Hayyuning (2014) mengenai proses marketing politik Kusuma Retno Rahayono, S.Sos dalam memenangkan Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Daerah Pemilihan Jawa Timur V Malang Raya faktor dominan terletak pada strategi push marketing yang dilakukan oleh calon anggota legislative tersebut.

Model strategi kampanye dalam proses marketing politik disini memang sudah cukup baik. Karena ketiga model yaitu push political marketing, pull political marketing, dan pass political marketing sudah berjalan beriringan. Tim pemenangan dalam melakukan proses marketing politik Kusuma Retno Rahayoni memang lebih dominan memperlihatkan sisi kedekatannya dengan masyarakat lewat program-program terjun langsung kemasyarakat. Maka dari itu, dengan strategi yang diterapkan semacam ini, tim pemenangan memang banyak berharap bisa mendapatkan suara sebanyak-banyaknya untuk lolos menjadi DPR RI periode 2014-2019.

Dari ketiga jenis strategi kampanye tersebut, ketika melihat dan mengamati kegiatan-kegiatan dalam proses marketing politiknya memang

cenderung menonjolkan push political marketing, dimana calon memang berupaya turun langsung kemasyarakat sembari memberikan pendidikan politik kepada target yang telah dibidik sebelumnya serta memanfaatkan beberapa tokoh, organisasi, maupun kelompok sebagai buah dari investasi sosial yang ditanam oleh calon ketika masih muda dulu.

2. Strategi Push Marketing Tim Sukses Husein Berbudhi Luhur dalam Memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyumas Periode 2013-2018

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Afif Amrullah (2014) mengenai bentuk-bentuk strategi push marketing yang dilakukan oleh Husein Berbudhi dalam memenangkan pilkada Banyumas 2013-2018. Push marketing merupakan bagian penting dari sembilan elemen political marketing. Push Marketing merupakan salah satu elemen political marketing dimana kandidat melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat terjun langsung untuk menemui masyarakat. Push Marketing juga dikenal sebagai experiential marketing. Pada pilkada Banyumas yang dilaksanakan pada 17 Februari 2013 Husein Berbudhi memenangkan pertarungan pilkada dengan perolehan suara 45,32%.

Pelaksanaan push marketing yang dilakukan oleh Husein Berbudhi meliputi tahap perencanaan, segmentasi, targeting, serta bentuk-bentuk kegiatan push marketing. Adapun bentuk-bentuk push marketing yang dilakukan oleh Husein Berbudhi adalah 1). Pengajian 2). Jalan sehat 3). Pengobatan gratis 4). Pembagian makanan pendamping ASI 5).

Kunjungan ke pasar 6). Kunjungan ke UKM 7). Ebegan 8). Mancing bersama HB 9). Parade kenthongan 10). Dialog dengan kelompok tani 11). Dialog dengan pemilih perempuan.